

Forum Group Discussion dan Pengenalan Aplikasi Akuntansi di BUMDes Gunung Cilik Desa Damarkasiyan Melalui Pendekatan *Participatory Action Research*

Romandhon Romandhon¹, Agus Putranto², Desy Wulandari³, Nur Baiti Jannati⁴, Rizky Maulidi⁵, Nanang Agus Suyono⁶, Susanti Susanti⁷, Fella Yunita Fitriyani⁸, Sri Hartiyah⁹, Kurniawati Mutmainah¹⁰

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sains Al-Qur'an, Wonosobo, Indonesia

Email: desywulandari@unsiq.ac.id

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan potensi ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan BUMDes masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam tata kelola organisasi, penyelesaian konflik antar pemangku kepentingan, serta pencatatan dan pelaporan keuangan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan pengelolaan BUMDes Gunung Cilik di Desa Damarkasiyan, meningkatkan pemahaman pengurus mengenai pentingnya tata kelola dan akuntabilitas keuangan, serta memperkenalkan aplikasi akuntansi sebagai sarana pendukung pencatatan dan pelaporan keuangan. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) melalui tahapan wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan tim pengabdian dan pengelola BUMDes. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pencatatan keuangan BUMDes Gunung Cilik masih dilakukan secara manual menggunakan buku kas sederhana dan belum didukung oleh sistem akuntansi berbasis komputer yang terstruktur. Selain itu, terdapat tantangan dalam membangun sinergi antar pemangku kepentingan yang berpotensi memengaruhi efektivitas pengelolaan BUMDes. Melalui kegiatan diskusi dan pengenalan aplikasi akuntansi, pengelola memperoleh pemahaman mengenai pentingnya digitalisasi pencatatan keuangan, transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam meningkatkan profesionalisme tata kelola BUMDes serta mendorong pengelolaan keuangan yang lebih efektif, tertib, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Akuntabilitas Keuangan, Aplikasi Akuntansi, *Participatory Action Research*.

Abstract

Village-Owned Enterprises (BUMDes) play a strategic role in optimizing the village's economic potential and improving the community's welfare. However, managing BUMDes still faces various challenges, especially in organizational governance, resolving conflicts among stakeholders, and financial recording and reporting. This community service activity aims to identify management problems at BUMDes Gunung Cilik in Damarkasiyan Village, enhance the board's understanding of the importance of governance and financial accountability, and introduce accounting applications as tools to support financial recording and reporting. The implementation method uses a Participatory Action Research (PAR) approach through interviews and Focus Group Discussions (FGD) involving the community service team and BUMDes management. The results of the activities show that the financial recording at BUMDes Gunung Cilik is still done manually using a simple cash book and is not yet supported by a structured computer-based accounting system. In addition, there are challenges in building synergy among stakeholders, which could affect the effectiveness of BUMDes management. Through discussions and the introduction of accounting applications, the managers gained an understanding of the importance of digitalizing financial records, transparency, accountability, and coordination among stakeholders. This activity is expected to be a first step in improving the professionalism of BUMDes governance and encouraging more effective, organized, and sustainable financial management.

Keywords: Financial Accountability, Accounting Application, *Participatory Action Research*.

Pendahuluan

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021, BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa lain untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, serta menyediakan jasa pelayanan dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa poin penting dalam peraturan terbaru tersebut meliputi status badan hukum BUMDes yang setara dengan korporasi atau perseroan, kepemilikan modal BUMDes yang dimiliki oleh Desa dan BUMDes dapat membentuk unit-unit usaha yang berbadan hukum terpisah.

Salah satu BUMDes yang populer di Kabupaten Wonosobo adalah BUMDes Gunung Cilik. BUMDes Gunung Cilik dikelola oleh BUMDes Damarkasiyan, Kecamatan Kertek. Unit usaha utamanya adalah berfokus pada ekowisata Gunung Cilik Kaliurip, bukit ikonik di tengah perkebunan teh yang menyajikan panorama alam memukau dan menjadi destinasi *hiking* ramah pemula. Daya tarik utamanya adalah jalur pendakian yang sudah tertata dengan bebatuan dan tangga sehingga memudahkan bagi para pendaki. Selain itu akses untuk menuju puncak dengan ketinggian tidak sampai 2.000 meter di atas permukaan laut tidak memerlukan waktu lama, hanya sekitar 10-15 menit. Fasilitas yang ditawarkan pengelola antara lain lahan parkir yang luas, *camping ground* yang memadai, *gazebo*, toilet dan musala yang terawat serta tarif yang cukup terjangkau.

Dengan adanya BUMDes Gunung cilik tersebut memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat desa setempat dan menjadi pilar penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Namun, seiring dengan pertumbuhan dan bertambahnya volume kunjungan ke Gunung Cilik, pengelola BUMDes menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan *Forum Grup Discussion* yang dilaksanakan antara pengurus BUMDes Gunung cilik dengan dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSIQ pada Senin, 25 Mei 2026, tantangan yang dihadapi antara lain potensi terjadinya konflik antara pihak desa dengan pengelola BUMDes dan pencatatan keuangan serta administrasi yang masih dilakukan secara manual dan sederhana.

Konflik yang terjadi di BUMDes Gunung Cilik dikarenakan terjadinya perbedaan kepentingan diantara para *stakeholder*. Konflik tersebut muncul manakala antar pihak saling memajukan ego masing-masing dan merasa memiliki posisi yang tinggi dengan yang lainnya. Sesuai dengan tujuan utama dari pendirian BUMDes yakni menggerakkan dan meningkatkan perekonomian desa serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi, sumber daya dan aset desa secara mandiri dan profesional, maka diperlukan sinergi yang baik antar *stakeholder*. Dengan sinergi yang terencana dan berbasis kepercayaan antar pihak sangat penting untuk mendorong perkembangan BUMDes yang berkelanjutan (Renevilota, et. al, 2025).

Pengelolaan keuangan BUMDES menjadi krusial guna menjamin akuntabilitas penggunaan dana desa, khususnya setelah adanya kebijakan alokasi minimal 20% untuk ketahanan pangan yang kemudian dialokasikan melalui BUMDES. Menurut (Mardiasmo, 2021) akuntabilitas merupakan kewajiban entitas publik untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya kepada masyarakat. Akuntabilitas BUMDES merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelola dalam mengelola sumber daya dan keuangan desa secara transparan, sesuai aturan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Mencakup dua dimensi yaitu akuntabilitas vertikal kepada

pihak yang lebih tinggi dan akuntabilitas horizontal kepada masyarakat desa (Ardiyansyah & Pesudo, 2022). Akuntabilitas diwujudkan melalui proses pengelolaan keuangan (manajemen keuangan) BUMDes yang baik dan tepat.

Selain akuntabilitas, penggunaan aplikasi akuntansi dalam pengelolaan BUMDes mampu membantu pengurus BUMDes dalam menyusun laporan keuangan serta sistematis, akuntabel dan sesuai regulasi (Zhulvi, et. al, 2025). Sistem akuntansi yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik mampu meningkatkan ketepatan pelaporan keuangan, mempercepat proses administrasi, dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sebaliknya, BUMDes yang belum memiliki sistem akuntansi formal cenderung menghadapi kesulitan dalam pengawasan keuangan dan pelaporan operasional (Sinaga, et. al, 2023).

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dan berdasarkan kajian pustaka yang ada, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Program Studi Akuntansi FEB UNSIQ Wonosobo bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas kepada para *stakeholder* terkait dengan penyelesaian konflik yang terjadi di BUMDes Gunung Cilik dan memberikan pengenalan serta pemahaman dalam pengaplikasian sistem akuntansi pada BUMDes guna membantu dalam penyederhanaan proses pencatatan, mempercepat penyusunan laporan dan menjamin kesesuaian dengan regulasi yang berlaku.

Metode pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan oleh tim Dosen Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo (FEB UNSIQ) di Dusun Kaliurip, Desa Damarkasiyan, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Salah satu program kerja utama yang dilaksanakan adalah *Forum Grup Discussion* dan Pengenalan Sistem Akuntansi di BUMDes Gunung Cilik Desa Damarkasiyan Melalui Pendekatan *Participatory Action Research*. Pendekatan ini dipilih karena menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif dalam proses identifikasi masalah dan penyusunan solusi. Kegiatan ini dirancang sebagai bentuk edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes Gunung Cilik di Desa Damarkasiyan.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah:

- Mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi BUMDes Gunung Cilik dalam pengelolaan usaha dan keuangan
- Meningkatkan pemahaman pengurus mengenai pentingnya tata kelola usaha dan keuangan yang baik
- Memperkenalkan aplikasi akuntansi BUMDes sebagai alat bantu pencatatan dan pelaporan keuangan
- Mendorong implementasi teknologi informasi dalam pengelolaan BUMDes

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari dua tahapan yakni:

1. Tahap Wawancara

Tim pelaksana melakukan proses identifikasi kebutuhan dan pemetaan kapasitas awal pengelola BUMDes, khususnya bendahara dan staf keuangan desa. Tim pelaksana juga melakukan proses identifikasi permasalahan selain permasalahan pencatatan dan administrasi. Wawancara dilakukan secara langsung,

menggunakan daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan pemahaman akuntansi, pengalaman dalam menyusun laporan keuangan, tingkat pemanfaatan teknologi atau aplikasi akuntansi yang pernah digunakan, serta permasalahan lain yang terjadi di BUMDes. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai kondisi faktual di lapangan, termasuk kendala administratif, keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman regulasi terkait laporan keuangan BUMDes, dan konflik yang terjadi disebabkan asimetri informasi. Selain itu, wawancara juga digunakan untuk mengukur kesiapan peserta dalam mengikuti pelatihan, sekaligus sebagai dasar penyusunan materi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta. Hasil wawancara menjadi rujukan penting dalam menentukan strategi pelatihan dan bentuk pendampingan yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi peningkatan tata kelola keuangan BUMDes secara transparan dan akuntabel.

2. Tahap *Focus Group Discussion* (FGD)

Pada tahap ini tim pelaksana dan perwakilan dari BUMDes Gunung Cilik melaksanakan FGD untuk menggali berbagai kendala yang dihadapi pengelola BUMDes. Diskusi dilakukan secara partisipatif sehingga seluruh peserta dapat menyampaikan pengalaman dan permasalahan yang dihadapi. Dari tim pelaksana kemudian memberikan beberapa solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di BUMDes. Pada tahap ini, tim pelaksana juga memperkenalkan sistem akuntansi yang dapat digunakan oleh BUMDes. Selain itu, tim juga memberikan sosialisasi mengenai pentingnya digitalisasi pencatatan keuangan.

Hasil dan pembahasan

Data lapangan menunjukkan bahwa di BUMDes Gunung Cilik telah melakukan pencatatan keuangan, namun masih secara sederhana. Pencatatan menggunakan buku kas manual sebagai alat utama pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas harian dan belum menggunakan format berbasis komputer seperti *spreadsheet* atau aplikasi akuntansi sederhana. Selain itu, di BUMDes Gunung Cilik juga belum menerapkan sistem akuntansi yang lebih formal seperti Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Temuan ini konsisten dengan studi Wahyuningsih et al. (2025) yang menunjukkan bahwa pencatatan keuangan BUMDes sering dilakukan secara manual dan belum sesuai prinsip akuntansi yang baku, sehingga berpotensi menimbulkan risiko kesalahan dan keterlambatan pelaporan. Penelitian sebelumnya juga mencatat keterbatasan SDM dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai kendala utama dalam pengelolaan keuangan BUMDes.

Data lapangan juga menemukan bahwa sistem pencatatan umumnya mencakup:

- a. Penerimaan kas, yang dicatat berdasarkan bukti transaksi penjualan atau setoran dari unit usaha
- b. Pengeluaran dicatat melalui bukti pembayaran dengan tanda tangan bendahara
- c. Rekonsiliasi dan pelaporan, dilakukan secara teratur namun tidak menentu waktunya
- d. Pengawasan internal, bergantung pada keaktifan pengurus dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)



Gambar 1. FGD dan Pengenalan Aplikasi Akuntansi BUMDes

Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Jetis melalui sosialisasi dan demonstrasi sistem akuaponik berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep, prinsip kerja, dan manfaat budidaya terpadu ikan dan tanaman. Partisipasi aktif masyarakat, khususnya generasi muda, menunjukkan adanya ketertarikan dan motivasi untuk mengaplikasikan teknologi pertanian sederhana ini di lahan pekarangan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif efektif dalam mendorong pemanfaatan sumber daya lokal secara produktif.

Selain aspek edukasi, kegiatan ini juga membuka peluang nilai ekonomi bagi rumah tangga. Pemanfaatan hasil panen dari sistem akuaponik tidak hanya mendukung ketahanan pangan keluarga melalui pengurangan ketergantungan terhadap pasar, tetapi juga memberikan potensi penciptaan nilai tambah, baik untuk konsumsi maupun penjualan skala kecil. Pendekatan ini menunjukkan bahwa inovasi pertanian berbasis teknologi dapat memberikan manfaat ganda: memenuhi kebutuhan pangan sekaligus meningkatkan efisiensi ekonomi rumah tangga.

Keterlibatan generasi muda dalam kegiatan ini menegaskan pentingnya peran edukasi pertanian berbasis teknologi dalam menarik minat mereka terhadap sektor pertanian modern. Dengan pendekatan yang aplikatif, mudah diterapkan, dan kontekstual dengan kondisi lokal, sistem akuaponik terbukti menjadi sarana yang relevan untuk menumbuhkan kesadaran, keterampilan, dan minat generasi muda terhadap pertanian.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara akademisi, masyarakat, dan pemangku kepentingan lokal dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan. Keberhasilan sosialisasi dan demonstrasi sistem akuaponik menunjukkan potensi pengembangan program lanjutan yang berfokus pada ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ekonomi rumah tangga berbasis inovasi pertanian berkelanjutan.

Saran

Penerapan sistem akuaponik di Desa Jetis memiliki potensi untuk dikembangkan secara berkelanjutan melalui pendampingan lanjutan agar masyarakat mampu mengelola sistem secara mandiri dan optimal sesuai kondisi lahan pekarangan. Ketertarikan generasi muda terhadap teknologi akuaponik menunjukkan pentingnya penguatan peran mereka sebagai penggerak pertanian berbasis teknologi di tingkat rumah tangga dan desa.

Selain mendukung ketahanan pangan, sistem akuaponik juga berpeluang memberikan nilai ekonomi apabila hasil panen dikelola secara produktif, baik untuk konsumsi maupun usaha skala kecil. Kegiatan ini juga dapat menjadi dasar bagi penelitian dan program pengabdian selanjutnya terkait ketahanan pangan, efisiensi ekonomi rumah tangga, serta pengembangan minat generasi muda terhadap pertanian berbasis teknologi melalui kolaborasi berkelanjutan antara perguruan tinggi, masyarakat, dan pemerintah desa.

Daftar Pustaka

- Ardiansyah, C., & Pesudo, D. (2022). Gaya Kepemimpinan, Kearifan Lokal, Dan Akuntabilitas Bumdes. *Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat*, 1(2), 38–55. <https://doi.org/10.24246/dekat.v1i2.9953>
- Mardiasmo. (2021). Akuntansi Sektor Publik. Andi Offset.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, <https://peraturan.bpk.go.id/>. (2021).
- Renevilota, G., Widiyanto, M.K., Ismail, H. (2025). Sinergitas Stakeholder Dalam Pengembangan BUMDes: Di Desa Centong, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 9(9). <https://doi.org/10.9963/aennsz92>
- Sinaga, E.B., Sitorus, R.D., Sitorus, R.M.A.P. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Terhadap Efisiensi Operasional pada BUMDes Kabupaten Samosir. *Co-Creation: Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Bisnis*, 2(3). <https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/co-creation/index>
- Wahyuningsih, R., Hayat, N., & Zakariah, I. (2025). Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Boro Kecamatan Sanggar. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(2), 630–640. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v8i2.1795>
- Zhulvi, A.A., Yuriandini, T. W., Rolika, S.P.A., Wijayanti, T.C., Sugiartono, E. (2025). Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDes melalui Pelatihan Penggunaan Aplikasi Akuntansi untuk Pengelolaan Keuangan BUMDes. *JPMI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(5), 36-42. <https://doi.org/10.62017/jpmi>